



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, KAMIS 12-09-2024



## RINGKASAN BERITA HARI INI

### Hampir 6 Ribu Calon Pemilih Dicooret dari DPS

Lebih dari 3 Ribu Pemilih Baru Nyoblos di Pilkada

SIDOARJO - Jumlah data calon pemilih Pilkada Serentak 2024 yang bermasalah di kabupaten ini ternyata cukup tinggi. Berdasarkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di seluruh kecamatan se-Sidoarjo, hampir 6 ribu calon pemilih dicooret.

Selain itu, juga ditemukan warga yang memenuhi syarat untuk memilih tapi tidak masuk DPS. Mereka akhirnya dimasukkan dalam data pemilih baru.

Jumlah itu mengacu hasil

rapat pleno penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di seluruh kecamatan. "Total, ada 3.959 pemilih baru yang akan dimasukkan dalam daftar pemilih," kata Komisiner Bawaslu Sidoarjo Agisma Dyah Fastari, kemarin (12/9). Selain itu, berdasarkan rekapitulasi DPSHP, jumlah pemilih di DPS yang masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS) mencapai 5.898 orang. Terbayak karena pemilih tersebut sudah meninggal. Juga ditemukan pemilih yang berstatus anggota TNI/Polri dan lainnya. Seluruhnya dicooret dari DPS. "Dengan demikian, dari

#### Hasil Sementara Perbaikan DPS Pilkada Serentak Sidoarjo

Jumlah Pemilih di DPS	1.481.547 orang
Hasil Perbaikan	
• Pemilih TMS	5.898 orang
• Pemilih baru	3.959 orang
• Selisih dengan DPS	1.939 orang

hasil akumulasi, jumlah pemilih di DPS saat ini berkurang hingga 1.939 orang," katanya. Namun, penyusunan DPSHP di tingkat kecamatan belum menjangkau daftar pemilih di lokasi khusus (lokus). Contohnya di rumah tahanan. "Sehingga, dipastikan jumlah daftar pemilih nantinya akan

Yahya mengatakan prosedur penyusunan daftar pemilih masih belum final. "Ple DPSHP di kecamatan akan diperbarui sesuai catatan dari peserta pleno," kata Yahya. Sebab, data tersebut masih bisa berubah. Misalnya jika ada tambahan warga yang meninggal dunia. "Tim kami di lapangan sampai membantu mengurus surat kematian. Ag datanya benar-benar sesuai," katanya. Sesuai regulasi, nantin DPSHP akan menjadi bah bagi KPU Sidoarjo untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024. (uzi/ris)

### Waspada Mpx, Dua RSUD Siapkan Ruang Isolasi

SIDOARJO - Dua rumah sakit umum daerah (RSUD) di Sidoarjo kini tengah siaga mengantisipasi temuan suspect kasus monkeypox (Mpx) di wilayah Jawa Timur. Ruang-ruang isolasi disiapkan.

Yang pertama adalah RSUD R. T. Notopuro. Di sana, ruang rawat inap isolasi sudah disiagakan. "Kami memang sudah memiliki ruang rawat inap isolasi. Yang disediakan khusus untuk penanganan kasus penyakit menular," kata Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD R. T. Notopuro dr. Prima Dessy Kusuma.

Menurutnya, ruang rawat inap isolasi menjadi fasilitas yang harus dimiliki rumah sakit kelas A sebagai rujukan tertinggi. Terutama untuk penanganan penyakit yang tidak bisa ditangani faskes di bawahnya. "Sehingga, jika

nanti ditemukan kasus Mpx, kita sudah siap," katanya.

RSUD Sidoarjo Barat (Sibar) juga bersiap terhadap potensi persebaran Mpx. Di sana sudah ada ruang rawat inap isolasi. "Untuk kapasitasnya mencapai delapan bed," kata Direktur RSUD Sibar dr. Abdillah Segaf Alhadad.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina menjelaskan, jajarannya memang cukup serius mengantisipasi persebaran Mpx. "Sebab, Sidoarjo adalah wilayah penyangga," katanya.

Saat ini, seluruh faskes sudah menyiapkan skema penanganan. Mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit. "Kita mulai koordinasikan dari tiap jenjang faskes," ujarnya. (eza/ris)



Plt Bupati Subandi meluncurkan BPJS Ketenagakerjaan untuk Ketua RT-RW.

### Ribuan Ketua RT-RW Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Sidoarjo - HARIAN BANGSA Ribuan ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Warga menerima jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan sosial ini diberikan oleh Pemkab Sidoarjo. Ada 8.548 ketua RT dan 2.083 Ketua RW yang menerima BPJS Ketenagakerjaan. Jika ditotal, berjumlah

10.931 orang Ketua RT-RW. Pemkab mendafatkan para ketua RT dan Ketua RW ini dalam kepesertaan JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan Jaminan Kematian (JKM). Iuran dua program tersebut ditanggung Pemkab Sidoarjo mulai Oktober hingga Desember 2024. Program pemberian BPJS

Ketenagakerjaan ini diluncurkan oleh Plt Bupati Sidoarjo Subandi, di Aula Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Tulangan, Rabu (11/9) malam. Subandi berharap adanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi para ketua RT RW.

Santunan akan diberikan kepada Ketua RT dan Ketua RW jika terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Dengan begitu akan meringankan beban ekonomi keluarga. "Saya berharap kerjanya ini akan terus berlanjut dan semakin berkembang di tahun-tahun mendatang," harap Subandi.

Asisten Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim Zakiah menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Sidoarjo atas dukungan terhadap program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. "Kami berharap ini dapat coverage (cakupan) BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo," harap Zakiah. (sta/ris)

### Plt Bupati Ajak Semua Pihak Jaga Stabilitas Jelang Pilkada 2024

SIDOARJO - Jelang Pilkada 2024, Plt. Bupati Sidoarjo, Subandi meminta seluruh stakeholder di lingkungan Kabupaten Sidoarjo mulai dari Pemerintah, DPRD, Forkopimda, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Aparatur Sipil Negara (ASN) serta elemen masyarakat mampu menjaga stabilitas politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. "Saya minta kepada Forkopimda terutama TNI Polri, Kajari untuk bekerja bersama menjaga stabilitas politik selama masa pemilu, serta kolaborasi kuat seluruh stakeholder juga menjadikan proses politik berjalan sehat dan positif sesuai regulasi yang ada," katanya saat sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Fave Hotel Sidoarjo Rabu (11/9/24) sore.



Rapat koordinasi tim pemantauan perkembangan politik di Fave Hotel Sidoarjo, Rabu (11/9/24)

Subandi juga mengatakan selain stabilitas juga tercapainya kondusivitas daerah selama Pemilu menjadi tanggung jawab semua pihak. "Saya juga meminta pemantauan KPU dan Bawaslu sebagai garda terdepan berhasil tidaknya pemilu di suatu daerah untuk mencetak pemimpin yang bersih dari kecurangan politik," tegasnya. "Terakhir, ia berpesan agar ASN tetap profesional dalam melaksanakan tugas dengan tidak terlibat dalam politik praktis yang bisa merusak integritas pemilu. "Sebagai ASN harus profesional dan netral dengan tidak berpihak kepada salah satu kandidat," pesannya. "Bagaimana demokrasi ini bisa berjalan, tentunya dengan harapan bahwa proses ini akan lebih baik daripada sebelumnya, dan bagaimana hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi menjadi evaluasi kita bersama. Terlebih, berita hoax dan media sosial saat ini menjadi bagian tak terpisahkan dari proses politik," tambahnya. • Loe

### PKM Unesa Bangkitkan UMKM Pengrajin Patung di Trowulan Mojokerto melalui Strategi Pengembangan SDM dan Digitalisasi Marketing

KOTA - UMKM pengrajin patung di Kecamatan Trowulan, Kota Mojokerto masuk dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dalam rangka Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Program yang dilakukan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengetahuan digitalisasi untuk memajukan UMKM Trowulan dalam hal memasarkan produknya ke segmen pasar yang lebih luas.

Dalam kegiatan ini, hadir Ketua PKM Prof. Dr. Dewie Tri Wijayati, M.Si., dengan anggota tim, di antaranya, Rath Amelia, Riedel Paulus Jacobis, dan Achmad Kautsar. Ketua PKM Prof. Dr. Dewie Tri Wijayati, M.Si., mengatakan, peran UMKM pengrajin



SINERGITAS: Ketua PKM Prof. Dr. Dewi Tri Wijayanti (depan dua dari kiri) didampingi Dr. Kausar (depan kiri) dalam kegiatan UMKM Pengrajin Patung di Desa Watusumpak Kecamatan Trowulan Mojokerto.

patung di Trowulan cukup besar dalam membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Terbukti, produksi patung dapat menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara di masanya. Karena hasil produksi yang diakui dan sudah dikenal sejak zaman dahulu, para pengrajin patung kerap menerima pesanan dari seluruh

## Hampir 6 Ribu Calon Pemilih Dicoret dari DPS

Lebih dari 3 Ribu Pemilih Baru Nyoblos di Pilkada

**SIDOARJO** - Jumlah data calon pemilih Pilkada Serentak 2024 yang bermasalah di kabupaten ini ternyata cukup tinggi. Berdasarkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di seluruh kecamatan se-Sidoarjo, hampir 6 ribu calon pemilih dicoret.

Selain itu, juga ditemukan warga yang memenuhi syarat untuk memilih tapi tidak masuk DPS. Mereka akhirnya dimasukkan dalam data pemilih baru.

Jumlah itu mengacu hasil

rapat pleno penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di seluruh kecamatan. "Total, ada 3.959 pemilih baru yang akan dimasukkan dalam daftar pemilih," kata Komisioner Bawaslu Sidoarjo Agisma Dyah Fastari, kemarin (12/9).

Selain itu, berdasarkan rekapitulasi DPSHP, jumlah pemilih di DPS yang masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS) mencapai 5.898 orang. Terbanyak karena pemilih tersebut sudah meninggal. Juga ditemukan pemilih yang berstatus anggota TNI/Polri dan lainnya. Seluruhnya dicoret dari DPS. "Dengan demikian, dari

### Hasil Sementara Perbaikan DPS Pilkada Serentak Sidoarjo

Jumlah Pemilih di DPS 1.481.547 orang

Hasil Perbaikan	
■ Pemilih TMS	5.898 orang
■ Pemilih baru	3.959 orang
■ Selisih dengan DPS	1.939 orang

Sumber: Diolah  
GRAFIS: RIZKI/JAWA POS

hasil akumulasi, jumlah pemilih di DPS saat ini berkurang hingga 1.939 orang," katanya.

Namun, penyusunan DPSHP di tingkat kecamatan belum menjangkau daftar pemilih di lokasi khusus (lokus). Contohnya di rumah tahanan. "Sehingga, dipastikan jumlah daftar pemilih nantinya akan

berubah," katanya.

Perubahan tersebut, kata Agis, akan terus berlangsung hingga menjelang coblosan 27 November mendatang. Sebab, dinamika data pemilih akan terus bergerak tiap harinya.

Sementara itu, Komisioner KPU Sidoarjo M. Natsiruddin

Yahya mengatakan proses penyusunan daftar pemilih masih belum final. "Pleno DPSHP di kecamatan akan diperbarui sesuai catatan dari peserta pleno," katanya.

Sebab, data tersebut masih bisa berubah. Misalnya jika ada tambahan warga yang meninggal dunia. "Tim kami di lapangan sampai membantu mengurus surat keterangan kematian. Agar datanya benar-benar sesuai," katanya.

Sesuai regulasi, nantinya DPSHP akan menjadi bahan bagi KPU Sidoarjo untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024. (uzi/ris)

## Jawa Pos

# Waspada Mpox, Dua RSUD Siapkan Ruang Isolasi

**SIDOARJO** - Dua rumah sakit umum daerah (RSUD) di Sidoarjo kini tengah siaga mengantisipasi temuan *suspect* kasus monkeypox (Mpox) di wilayah Jawa Timur. Ruang-ruang isolasi disiapkan.

Yang pertama adalah RSUD R. T. Notopuro. Di sana, ruang rawat inap isolasi sudah disiagakan.

nanti ditemukan kasus Mpox, kita sudah siap," katanya.

RSUD Sidoarjo Barat (Sibar) juga bersiap terhadap potensi persebaran Mpox. Di sana sudah ada ruang rawat inap isolasi. "Untuk kapasitasnya mencapai delapan *bed*," kata Direktur RSUD Sibar dr. Abdillah Segaf Alhadad.

Kami memang sudah memiliki ruang rawat inap isolasi. Yang disediakan khusus untuk penanganan kasus penyakit menular," kata Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD R. T. Notopuro dr. Prima Dessy Kusuma.

Menurutnya, ruang rawat inap isolasi menjadi fasilitas yang harus dimiliki rumah sakit kelas A sebagai rujukan tertinggi. Terutama untuk penanganan penyakit yang tidak bisa ditangani faskes di bawahnya. "Sehingga, jika

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo dr. Laksmie Herawati Yuwantina menjelaskan, jajarannya memang cukup serius mengantisipasi persebaran Mpox. "Sebab, Sidoarjo adalah wilayah penyangga," katanya.

Saat ini, seluruh faskes sudah menyiapkan skema penanganan. Mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit. "Kita mulai koordinasikan dari tiap jenjang faskes," ujarnya. **(eza/ris)**

 Dipindai dengan CamScanner

# Jawa Pos

## PKM Unesa Bangkitkan UMKM Pengrajin Patung di Trowulan Mojokerto melalui Strategi Pengembangan SDM dan Digitalisasi Marketing

KOTA - UMKM pengrajin patung di Kecamatan Trowulan, Kota Mojokerto masuk dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dalam rangka Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Program yang dilakukan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengetahuan digitalisasi untuk memajukan UMKM Trowulan dalam hal memasarkan produknya ke segmen pasar yang lebih luas.

Dalam kegiatan ini, hadir Ketua PKM Prof. Dr. Dewie Tri Wijayati, M.Si., dengan anggota tim, di antaranya, Ratih Amelia, Riedel Paulus Jacobis, dan Achmad Kautsar.

Ketua PKM Prof. Dr. Dewie Tri Wijayati, M.Si., mengatakan, peran UMKM pengrajin



ANAS/RADAR SIDOARJO

**SINERGITAS:** Ketua PKM Prof. Dr. Dewi Tri Wijayanti (depan dua dari kiri) didampingi Dr. Kausar (depan kiri) dalam kegiatan UMKM Pengrajin Patung di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Mojokerto.

patung di Trowulan cukup besar dalam membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Terbukti, produksi patung dapat menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanega-

ra di masanya.

Karena hasil produksi yang diakui dan sudah dikenal sejak zaman dahulu, para pengrajin patung kerap menerima pesanan dari seluruh

● **Ke Halaman 10**

CS Dipital dengan Cerdik

**RADAR**  
SIDOARJO.ID

### PKM Unesa ...

wilayah Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri.

Perlu diketahui, Trowulan merupakan daerah yang telah dikenal sejak 1975 sebagai pengrajin patung. Seiring berjalannya waktu, banyak warga yang berbondong-bondong membuat patung karena masalah ekonomi dan di saat itu, banyak warga asing mengunjungi situs-situs di Trowulan pada 1998.

"Hal ini sebagai modal

yang sangat kuat dalam 'branding'. Sehingga para- jin tinggal menggali ingatan akan kejayaan masa lalu, serta memberikan inovasi dalam produksi dan pemasaran," ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya hadir untuk memberikan penguatan manajerial dari sisi SDM dan pengetahuan digitalisasi untuk membangkitkan UMKM di Trowulan dalam hal pemasaran produk.

Selain itu, pengelolaan

22 destinasi wisata di Trowulan yang belum maksimal juga menjadi sorotan. Pengelolaan sektor pariwisata harus diperhatikan setiap elemen, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat.

Dia berharap, dukungan ini dapat menumbuhkan rasa bangga dan ketertarikan di kalangan generasi muda untuk melanjutkan usaha yang memiliki warisan budaya yang berharga ini. (dik/vga)

CS Dipital dengan Cerdik

**RADAR**  
SIDOARJO.ID



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Plt Bupati Ajak Semua Pihak Jaga Stabilitas Jelang Pilkada 2024

**SIDOARJO** - Jelang Pilkada 2024, Plt. Bupati Sidoarjo, Subandi meminta agar seluruh stakeholder di lingkungan Kabupaten Sidoarjo mulai dari Pemerintah, DPRD, Forkopimda, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Aparatur Sipil Negara (ASN) serta elemen masyarakat mampu menjaga stabilitas politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.

“Saya minta kepada Forkopimda terutama TNI Polri, Kajari untuk bekerja bersama menjaga stabilitas politik selama masa pemilu, serta kolaborasi kuat seluruh stakeholder juga menjadikan proses politik berjalan sehat dan positif sesuai regulasi yang ada,” katanya saat sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Tim Pemanfaatan Perkembangan Politik di Fave Hotel Sidoarjo Rabu (11/9/24) sore.

Subandi juga mengatakan selain stabilitas juga tercipt-

tanya kondusivitas daerah selama Pemilu menjadi tanggung jawab semua pihak.

“Saya juga meminta pemantauan KPU dan Bawaslu sebagai garda terdepan berhasil tidaknya pemilu di suatu daerah untuk mencetak pemimpin yang bersih dari kecurangan politik,” tegasnya.

Terakhir Ia berpesan agar ASN tetap profesional dalam melaksanakan tugas dengan tidak terlibat dalam politik praktis yang bisa merusak integritas pemilu.

“Sebagai ASN harus profesional dan netral dengan tidak berpihak kepada salah satu kandidat,” pesannya.

“Bagaimana demokrasi ini bisa berjalan, tentunya dengan harapan bahwa proses ini akan lebih baik daripada sebelumnya, dan bagaimana hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi menjadi evaluasi kita bersama. Terlebih, berita hoax dan media sosial saat ini menjadi bagian tak terpisahkan dari proses politik,” tambahnya. ● Loe



LOETFI/DUTA

Rapat koordinasi tim pemantauan perkembangan politik di Fave Hotel Sidoarjo, Rabu (11/9/24)

CS Dipindai dengan CamScanner

## DUTA



Plt Bupati Subandi melaunching BPJS Ketenagakerjaan untuk Ketua RT-RW.

# Ribuan Ketua RT-RW Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Sidoarjo - HARIAN BANGSA Ribuan ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga menerima jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan sosial ini diberikan oleh Pemkab Sidoarjo. Ada 8.848 ketua RT dan 2.083 Ketua RW yang menerima BPJS Ketenagakerjaan. Jika ditotal, berjumlah

10.931 orang Ketua RT-RW. Pemkab mendaftarkan para ketua RT dan Ketua RW ini dalam kepesertaan JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan Jaminan Kematian (JKM). Iuran dua program tersebut ditanggung Pemkab Sidoarjo mulai Oktober hingga Desember 2024. Program pemberian BPJS

Ketenagakerjaan ini dilaunching oleh Plt Bupati Sidoarjo Subandi, di Aula Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Tulangan, Rabu (11/9) malam. Subandi berharap adanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi para ketua RT RW.

Santunan akan diberikan kepada Ketua RT dan Ketua RW jika terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Dengan begitu akan meredakan beban ekonomi keluarga. "Saya berharap kerjasama ini akan terus berlanjut dan semakin berkembang di tahun-tahun mendatang," harap Subandi.

Asisten Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim Zakiah menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Sidoarjo atas dukungan terhadap program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. "Kami berharap ini dapat coverage (cakupan) BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo," harap Zakiah. (sta/rus)

CS Dipindai dengan CamScanner

## RT RW Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

Inspirasi Global © September 12, 2024

0



Sidoarjo- inspirasiglobal.net. Pemkab Sidoarjo memberikan perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh ketua RT RW desa / kelurahan se Kabupaten Sidoarjo. Ada 8.848 orang ketua RT dan 2.083 orang ketua RW totalnya 10.931 orang Rt/RW. Pemkab Sidoarjo mengikutkan mereka dalam kepersertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan. Iuran dua program tersebut ditanggung Pemkab Sidoarjo mulai bulan Oktober sampai Desember 2024.

Kemarin malam, Rabu, (11/9), program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan di launching Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi SH.M,Kn di Aula Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas/BPVP Tulangan. Peluncuran program ini menjadi bukti nyata sinergi pemerintah daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan. Melalui program tersebut Pemkab Sidoarjo ingin memastikan seluruh masyarakat Sidoarjo dapat merasakan manfaat jaminan sosial yang layak.

"Untuk kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan ada sebanyak 10.931 RT RW di desa dan kelurahan yang akan kita jamin untuk mendapat jaminan sosial,"ucapnya.

Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi berharap dengan adanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi para ketua RT RW. Santunan akan diberikan jika terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Dengan begitu akan meringankan beban ekonomi keluarga.

"Saya berharap, kerjasama ini akan terus berlanjut dan semakin berkembang di tahun-tahun mendatang,"harapnya.

Kedepan, H. Subandi berharap cakupan program tersebut dapat diperluas. Dengan begitu semakin banyak masyarakat yang akan merasakan manfaatnya.

"Semoga program BPJS ini membawa dampak positif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sidoarjo,"ucapnya.







# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Asisten Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim Zakiah yang hadir menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Sidoarjo atas kepedulian dan dukungan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Pemkab Sidoarjo juga telah memberikan jaminan perlindungan sosial kepada masyarakat. Diantaranya diberikan kepada tenaga kerja non ASN sebanyak 4.500 orang, penyelenggara Pilkada sebanyak 27.240 orang, kader kesehatan sebanyak 12.633 orang dan perlindungan pekerja rentang melalui dana DBHCHT sebanyak 13.249 orang. ditambah 10.931 orang ketua RT maupun RW se Kabupaten Sidoarjo.

"Harapan kami dengan perlindungan ketua RT RW dapat meningkatkan coverage (cakupan) BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo,"ucapnya.

Sementara itu dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sidoarjo tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ketua RT RW di Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu juga diserahkan santunan JKM sekaligus beasiswa pendidikan sebesar Rp. 123 juta oleh Plt. Bupati kepada keluarga almarhum Endi Mulyono perangkat Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu.  
(Cak met)

# Dana Pensiun Kades dan BPD.Pepesan Kosong H Subandi Jelang Pilkada?

dimensin | 12 September 2024, 14:07 pm | 0 comments | 91 views



Plt Bupati Sidoarjo H Subandi, saat memberikan sambutan dalam acara Bimtek Kepala Desa dan BPD se\_Kab Sidoarjo yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di Hotel Atria Malang Selasa (10/9) lalu.

Anggota Komisi D yang juga anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Sidoarjo Bangun Winarso serta Direktur LSM CePad, Kasmuin. (Dillah)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

DIMENSINEWS.COM; SIDOARJO ; Entah (mungkin) karena saking semangatnya, Plt Bupati Sidoarjo H Subandi yang saat ini juga sudah resmi ikut ber-kontestasi dalam Pilkada Bulan November depan menebar janji bakal memberi tambahan insentif/nominal penghasilan berupa dana pensiun sebesar Rp 59 juta kepada seluruh Kepala Desa (Kades) dan Lembaga Badan Perwakilan Desa (BPD) Sidoarjo.

Penegasan pasangan Calon wakil bupati (Cawabup) Mimik Idayana yang diusung koalisi Partai Gerindra, Golkar dan Demokrat ini disampaikan Subandi dalam acara Bimbingan teknis (Bimtek) Kades dan Ketua BPD se-Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di Hotel Atria Malang Selasa (10/9) lalu.

Subandi yang hadir untuk membuka dan sekaligus memberikan sambutan resmi dalam acara Bimtek bertema Pembinaan Kepala Desa dan BPD tersebut berjanji tambahan dana pensiun akan mulai diberikan mulai Tahun 2025 depan.

Janji pemberian dana pensiun tersebut tak pelak membuat ratusan Kades dan BPD terutama yang sebentar lagi habis masa jabatannya tersebut otomatis disambut antusias, karena bagi Kades dan BPD khabar gembira tersebut tentu saja bakal mendapat durian runtuh disiang hari bolong.

Namun perasaan gembira para Kades dan BPD tersebut menjadi sirna tatkala kasak-kusuk dikalangan pejabat desa seputar kebenaran rencana tambahan dana pensiun sampai di telinga para pejabat berwenang baik di eksekutif dan sebagian anggota dewan berselang 2 hari pasca acara Bimtek tersebut.

Banyaknya Kades dan BPD yang menanyakan kebenaran khabar gembira tersebut tak urung pulang membuat pejabat eksekutif dan terutama di lingkup DPRD juga menjadi bingung.

Pasalnya, pihak eksekutif dan legislatif merasa tidak pernah melakukan pembahasan terkait rencana alokasi anggaran yang diperuntukan untuk pemberian tambahan insentif/pensiun bagi Kades dan BPD tersebut.

Bahkan sejumlah pihak menilai janji Subandi yang akan memberi uang tambahan pensiun tersebut hanya isapan jempol dan sebagian lagi menganggap janji itu tak ubahnya hanya pemberian harapan palsu (PHP) yang bersifat komoditas politik jelang Pilkada 2024.



menjelaskan dalam rancangan APBD 2025 tidak pernah ada pembahasan anggaran yang dialokasikan untuk dana pensiun bagi Kades maupun BPD. Begitu pula dalam Kebijakan Umum (KUA) APBD Perubahan Prioritas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mengatur hal itu dalam PAK terakhir, soal dana pensiun kades dan BPD ini tidak pernah dibahas oleh legislatif (DPRD) maupun eksekutif (Pekab Sidoarjo).

Hampir semua anggota legislatif mengatakan sejauh ini belum pernah ada pembahasan tentang dana pensiun Kades dan BPD se-Sidoarjo. Pihak DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) maupun pihak eksekutif melalui Panitia Anggaran (Panggar), belum pernah sama sekali mengusulkan alokasi anggaran dana pensiun tersebut. Sehingga dalam Rancangan APBD 2025 tidak tercantum alokasi anggaran untuk kepentingan tersebut.

Hal itu juga dipertegas Bangun Winarso. "Seingat saya, di PAK terakhir belum ada pembahasan terkait dana pensiun Kades dan BPD. Kalau soal tambahan ADD, juga belum dirumuskan," kata Bangun.

Pernyataan senada juga diungkapkan Direktur LSM CePAD (Centre for participatory development) Kasmuin yang selama ini konsen terhadap kepedulian pemberdayaan masyarakat desa? "Dana pensiun itu memang bisa diberikan dengan dasar hukumnya UU Desa No. 03 Tahun 2024.

Hanya saja untuk merealisasi itu tidak mudah, apalagi informasi Banggar maupun Panggar tidak pernah membahas anggaran soal itu pada RAPBD 2025," katanya.

Sebagai pihak yang konsen terhadap pemberdayaan desa, Kasmuin mengaku tergerak untuk mencari informasi dari Banggar terkait apa yang disampaikan Plt bupati Sidoarjo pada kegiatan di Malang tersebut. Dia juga mencoba konfirmasi ke pihak Panggar Pekab Sidoarjo.

"Sejauh informasi yang diterima, Kasmuin menegaskan belum ada pembahasan sama sekali dalam RPABD 2025. "Sehingga apa yang disampaikan Plt bupati kalau bersifat rencana, sah-saha saja. Tidak apa-apa," ujarnya. "Tetapi kalau sudah menyebut nominal, seperti dana pensiun Kades sebesar Rp 50 juta, itu berarti itu bukan lagi rencana, tapi seharusnya sudah ada kekuatan hukum. Ini bahaya, karena anggarannya sendiri belum pernah dibahas sama sekali di DPRD," tambahnya.

Sehingga dalam masalah ini, pihaknya menganggap janji Plt Bupati Subandi lebih bersifat rencana dan sebagai komoditas politik menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati Sidoarjo yang dihelat 27 Nopember 2024. "Kalau melihat saat ini, karena anggaran untuk itu belum pernah dibahas dalam RAPBD 2024, itu berarti rencana yang sangat mungkin menjadi sebuah PHP. Efeknya masyarakat desa bisa bergejolak," ujarnya. (Dillah)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

“Untuk persyaratan pendaftaran, relatif sama dengan persyaratan PTPS sebelumnya. Salah satunya berusia minimal 21 tahun saat mendaftar dan bukan anggota partai politik,” katanya.

Selain itu, calon petugas PTPS harus sehat secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai serta didukung dengan surat keterangan kesehatan.

“Lebih lengkapnya, bisa dilihat di medsos (media sosial, red) Bawaslu Sidoarjo,” ungkapnya.

Para calon petugas PTPS yang lolos seleksi administrasi akan diumumkan oleh Bawaslu Sidoarjo pada tanggal 11 Oktober 2024 nanti. Kemudian dilanjutkan dengan tes

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo  
wawancara pada 12-22 Oktober 2024.

Sedangkan, untuk penetapan dan pengumuman calon terpilih berdasarkan hasil tes wawancara akan diumumkan pada 23-25 Oktober 2024.

“Salah satu tugas dari PTPS, yaitu melakukan pengawasan selama proses pemungutan suara dan penghitungan surat suara di TPS. Karena, kami ingin selama proses penghitungan suara berjalan dengan aman, lancar, jujur dan adil sesuai dengan aturan yang berlaku,” terangnya.

Menurut Fathur Rohman bahwa Bawaslu Jawa Timur (Jatim) akan mengadakan rapat koordinasi bersama semua Kordiv SDMO dan Diklat untuk mematangkan teknis rekrutmen hingga pelatihan terhadap petugas PTPS.







# INFO MEDIA PERS

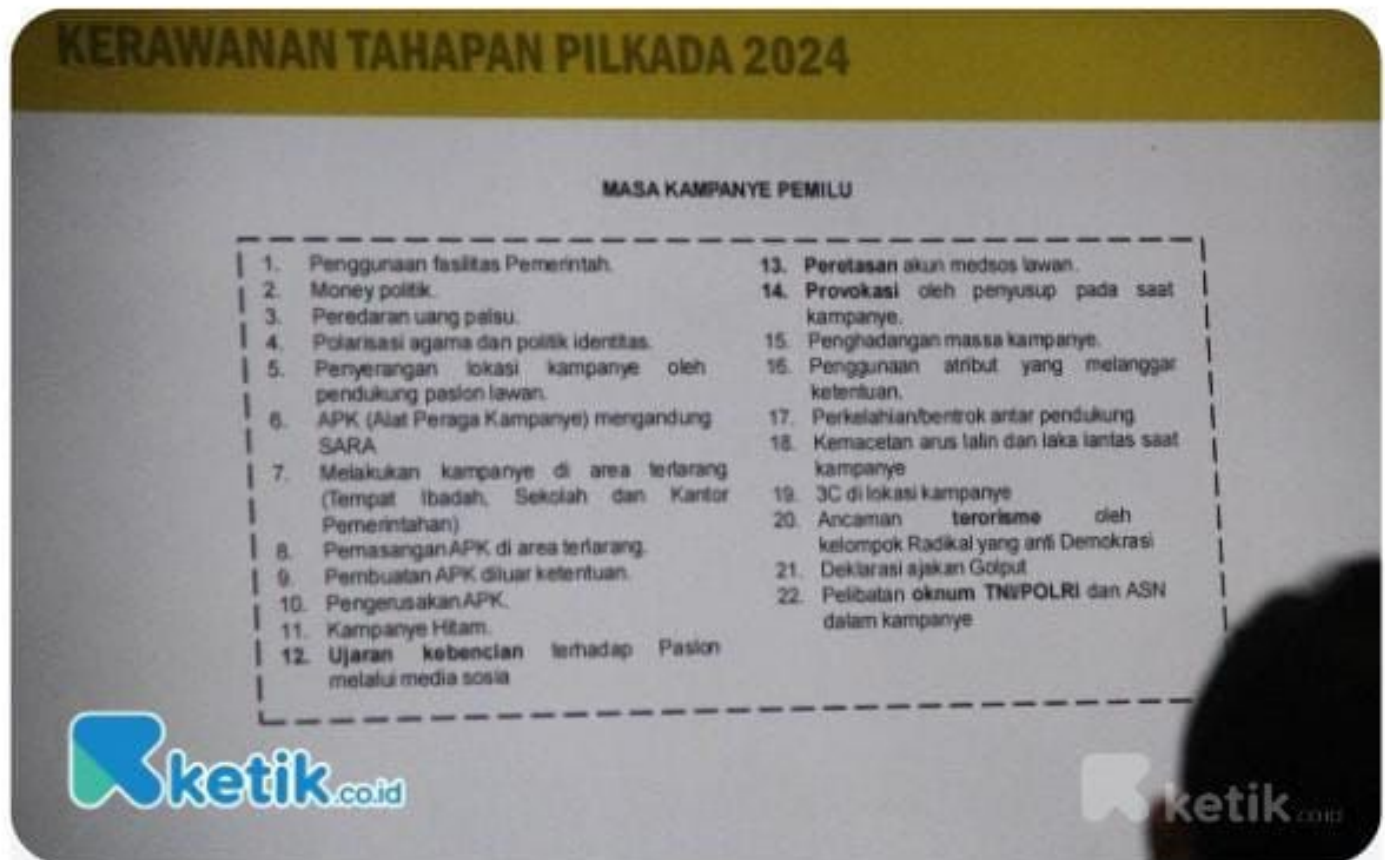
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Ketik.co.id / Kanal Politik & Pemerintahan

## Inilah Potensi Kerawanan Pilkada Sidoarjo 2024 Menurut Pemetaan TNI, Jaksa, dan Polri

Editor: Fathur Roziq

13 Sep 2024 07:25



Analisis dan pemetaan kerawanan Pilkada 2024 oleh Sat Intelkam Polresta Sidoarjo. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Politik & Pemerintahan



Aa

AA

**KETIK, SIDOARJO** – Stabilitas politik sangat penting menjelang Pilkada 2024. Peta-peta kerawanan menjadi perhatian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sidoarjo dalam Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Fave Hotel Sidoarjo pada Rabu (11/9/2024). Kerja sama *stakeholders* sangat diperlukan.

Plt Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn membuka acara yang diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sidoarjo itu. Dalam rapat tersebut, hadir pemateri dari perwakilan Forkopimda Kabupaten Sidoarjo. PASI Intel Kodim 0816/Sidoarjo Lettu Udhan Kusuma Tirta, Kasi Intelijen Kejari Sidoarjo Hadi Sucipto, dan Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo Kopol Awaludin Wijaya. Moderatornya adalah Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo M. Ainur Rahman.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Apa saja kerawanan tersebut? Lettu Udhan Kusuma Tirta menyebutkan, ada sejumlah titik yang perlu menjadi pusat perhatian dan jaminan keamanan. Di antaranya, kantor KPU Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo, DPRD Sidoarjo, Alun-Alun Sidoarjo, Terminal Purabaya, Bandara Juanda, serta pusat-pusat ekonomi di Kota Delta.

"Objek vital lain juga menjadi perhatian," kata Lettu Udan.



Tidak hanya objek vital. Ada kelompok-kelompok yang juga perlu mendapatkan perhatian. Perguruan silat, misalnya, yang anggotanya semakin banyak. Selain itu, buruh, mahasiswa, serta organisasi masyarakat lain terkait potensi unjuk rasa.

"Hingga bulan September ini kondisi Sidoarjo tetap aman kondusif," katanya pada Rabu (11/9/2024) di Fave Hotel Sidoarjo.

Kasi Intelijen Kejari Sidoarjo Hadi Sucipto memaparkan sejumlah fakta dan data kerawanan pemilu saat Pileg dan Pilpres 2024 lalu. Ada berbagai kejadian dan peristiwa yang mewarnai pelaksanaan Pemilu 2024. Baik sebelum, selama, maupun setelah Pemilu 2024 berlangsung. Semuanya telah dievaluasi oleh Bawaslu Sidoarjo.

Di antaranya, pembaruan data pemilih, netralitas ASN dan perangkat desa, kesiapan logistik, dan sebagainya. Setidaknya ada 12 kerawanan dalam Pilkada serentak 2024 ini. Termasuk, kemungkinan *money politics*.

Hadi Sucipto menyatakan kejaksan siap mendirikan posko di kantor Kejari Sidoarjo. Posko ini selalu mengikuti perkembangan Pilkada 2024. Bersama-sama pihak lain, tim kejaksan juga akan bersinergi.

Kompol Awaludin Wijaya menjadi narasumber terakhir dalam rapat koordinasi tim pemantau perkembangan politik ini. Kerawanan di dalam pemilu yang perlu diperhatikan, antara lain, *money politics*, pelibatan ASN dan TNI/Polri dalam kampanye, polarisasi agama dan politik identitas, dan sebagainya. Di dunia maya, perlu pula diwaspadai munculnya ujaran kebencian di media sosial dan peretasan akun medsos.

Polresta Sidoarjo, lanjut Kompol Awaludin Wijaya, mengajak semua pihak untuk tidak hanya mewaspadai kerawanan di dalam penyelenggaraan pilkada. Ada yang tidak kalah penting. Awaludin menyebut adanya potensi terorisme. Sebab, di Sidoarjo, masih ada eks narapidana terorisme yang patut menjadi perhatian.

"Ada ancaman kelompok radikal yang antidemorasi," ungkapnya.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## LSM CePaD :JANJI PLT BUPATI BERI DANA PENSUN KADES dan BPD. Diduga” Ada Kepentingan Politik.

Redaksi  
September 13, 2024



Sidoarjo, Siarpos.com,Plt Bupati Subandi yang menjanjikan tambahan nominal pensiun kepala desa (Kades) dan BPD se-Sidoarjo yang dimulai tahun anggaran 2025, rasanya sulit direalisasikan. Bahkan banyak pihak menilai lebih terkesan sebuah pemberian harapan palsu (PHP), atau hanya bersifat komoditas politik semata menjelang Pilkada 2024.

Mengingat, dalam Rancangan APBD 2025 tidak pernah ada pembahasan anggaran yang dialokasikan untuk dana pensiun bagi Kades maupun BPD. Begitu pula dalam Kebijakan Umum (KUA) APBD Perubahan Prioritas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mengatur hal itu dalam PAK terakhir, soal dana pensiun kades dan BPD ini tidak pernah dibahas oleh legislatif (DPRD) maupun eksekutif (Pemkab Sidoarjo).

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

ketika masalah ini dikomunikasi ke beberapa anggota legislatif, hampir semua mengatakan sejauh ini belum pernah ada pembahasan tentang dana pensiun Kades dan BPD se-Sidoarjo. Pihak DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) maupun pihak eksekutif melalui Panitia Anggaran (Panggar), belum pernah sama sekali mengusulkan alokasi anggaran dana pensiun tersebut. Sehingga dalam Rancangan APBD 2025 tidak tercantum alokasi anggaran untuk kepentingan tersebut.



Hal itu juga dipertegas Bangun Winarso. "Seingat saya, di PAK terakhir belum ada pembahasan terkait dana pensiun Kades dan BPD. Kalau soal tambahan ADD, juga belum dirumuskan," kata Bangun. Janji Plt Bupati Subandi yang memastikan berkontestasi pada Pilkada 2024, diungkapkan di sela-sela kegiatan Pembinaan Kepala Desa dan BPD se-Kabupaten Sidoarjo yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sidoarjo, di Atres Hotel Malang, berlangsung pada 10 September dan 17 September 2024. Dalam kesempatan itu, Subandi penyampaian tambahan alokasi dana desa (ADD) senilai Rp 500 juta dan tambahan dana pensiun untuk Kades sebesar Rp 50

juta pada tahun 2025 nanti. Dia juga





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

menegaskan adanya tambahan dana pensiun BPD, namun tidak menyebut nominalnya.

Lalu bagaimana tanggapan Kasmuin, LSM CePAD yang selama ini konsen terhadap kepedulian pemberdayaan masyarakat desa? “Dana pensiun itu memang bisa diberikan dengan dasar hukumnya UU Desa No. 03 Tahun 2024. Hanya saja untuk merealisasi itu tidak mudah, apalagi informasi Banggar maupun Panggar tidak pernah membahas anggaran soal itu pada RAPBD 2025,” katanya.

Sebagai pihak yang konsen terhadap pemberdayaan desa, Kasmuin mengaku tergerak untuk mencari informasi dari Banggar terkait apa yang disampaikan Plt bupati Sidoarjo pada kegiatan di Malang tersebut. Dia juga mencoba konfirmasi ke pihak Panggar Pemkab Sidoarjo.

“Sejauh informasi yang diterima, Kasmuin menegaskan belum ada pembahasan sama sekali dalam RPABD 2025. “Sehingga apa yang disampaikan Plt bupati kalau bersifat rencana, sah-saha saja. Tidak apa-apa,” ujarnya. “Tetapi kalau sudah menyebut nominal, seperti dana pensiun Kades sebesar Rp 50 juta, itu berarti itu bukan lagi



keputusan hukum. Ini bahaya, karena  
anggarannya sendiri belum pernah dibahas  
sama sekali di DPRD," tambahnya.  
Sehingga dalam masalah ini, pihaknya  
menganggap janji Plt Bupati Subandi lebih  
bersifat rencana dan sebagai komoditas



---

politik menjelang pemilihan bupati dan wakil  
bupati Sidoarjo yang dihelat 27 Nopember  
2024. "Kalau melihat saat ini, karena  
anggaran untuk itu belum pernah dibahas  
dalam RAPBD 2024, itu berarti rencana yang  
sangat mungkin menjadi sebuah PHP.  
Efeknya masyarakat desa bisa bergejolak,"  
ujarnya. (Cak Sokran)

